

DAFTAR BACAAN

BUKU

Anggriani, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Djatmiati, Tatik Sri, Urip Santoso, dan Lilik Pudjiastuti, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.

Hadjon, Philipus M. et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Spelt, N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, diterjemahkan oleh Philipus M. Hadjon, YURIDIKA, Surabaya, 1993.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

SURAT KABAR

Putra, Dwi Aditya, “Aduan Belanja Online Capai 19 Ribu Kasus, Terbanyak Barang Tak Dikirim”, *Liputan6* (online), 5 April 2019, <https://m.liputan6.com/bisnis/read/3934592/aduan-belanja-online-capai-19-ribu-kasus-terbanyak-barang-tak-dikirim>

Setiawan, Sakina Rakhma Diah, “E-commerce Apa yang Pimpin Pasar Indonesia?”, *Kompas* (online), 26 Agustus 2019, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2019/08/26/122218226/e-commerce-apa-yang-pimpin-pasar-indonesia>

SKRIPSI

Arrum, Desi Arianing, *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, **Skripsi**, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.

Laksmi, Puspita Dewi, *Tanggung Jawab Shopee Dalam hal Terjadi Penipuan Yang Menimbulkan Kerugian Pembeli Dalam Jual Beli Online*, **Skripsi**, Program Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214).

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210.PMK.010./2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1855).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Online Single Submission (Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Version 1.5 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2018).

INTERNET

“Menanti PP E-Commerce Demi Lindungi Konsumen”, *www.hukumonline.com*, 3 Mei 2018, dikunjungi pada tanggal 14 November 2019

JURNAL

Arrum, Desi Arianing, ‘Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (One Single Submission) di Indonesia’, *Jurist-diction*, Vol 2, No 5, September 2019.

Harahap, Dedy Ansari dan Dita Amanah, ‘Perilaku Belanja Online di Indonesia: Studi Kasus’, *Jurnal Riset dan Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, Vol 9, No 2, 2018.

Husni, M., ‘Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Yang Responsif’, *Jurnal Equality*, Vol 11, No 1, Februari 2016.

Maryama, Siti, ‘Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha’, *Jurnal Liquidity*, Vol, 2, No. 1, Januari-Juni 2013.

Pradana, Mahir, ‘Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia’, *Jurnal: MODUS*, Vol. 27, No. 2, 2015.

Syahrin, M. Alvi, ‘Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E- Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional’, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 7, No 2, Agustus 2018.

Ujia, Nia dan RR. Siti Munawaroh, 'Pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Beli Online',
Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol 19, No 2, Oktober 2018.